

MENYIKAPI TANTANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA: SOLUSI INKLUSIF MELALUI ANALISIS KEBIJAKAN

Reski Gunawan¹, Fisman Bedi²

^{1,2}Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Alamat e-mail : 1reskig47@gmail.com , 2bangbedi@gmail.com

ABSTRACT

The issue of educational policy in Indonesia has become a major concern in efforts to improve human resource quality and global competitiveness. This article aims to analyze the issues of educational policy in Indonesia through a literature review approach. The study identifies key problems such as disparities in educational access, teaching quality, and curriculum relevance to labor market needs. By reviewing various literatures from journals, reports, and academic sources, this article offers a new perspective to formulate more inclusive and adaptive policies. The findings show that educational policies integrated with technology and tailored to local needs have significant potential to enhance the effectiveness of the educational system.

Keywords: Educational policy, access disparity, teaching quality, curriculum relevance, educational technology

ABSTRAK

Isu kebijakan pendidikan di Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing global. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu kebijakan pendidikan di Indonesia melalui pendekatan literature review. Studi ini mengidentifikasi permasalahan utama seperti disparitas akses pendidikan, kualitas pengajaran, dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan dunia kerja. Dengan mengkaji berbagai literatur dari jurnal, laporan, dan sumber akademik, artikel ini menawarkan perspektif baru untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang terintegrasi dengan teknologi dan berbasis kebutuhan lokal memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas sistem pendidikan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Disparitas Akses, Kualitas Pengajaran, Relevansi Kurikulum, Teknologi Pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan nasional, khususnya di Indonesia

yang memiliki tantangan besar dalam aspek geografis, sosial, dan ekonomi. Kebijakan pendidikan dirancang untuk menjawab tantangan ini, namun

masih terdapat banyak kendala yang belum terselesaikan. Isu disparitas akses, rendahnya kualitas pendidikan, dan ketidakselarasan kurikulum menjadi sorotan utama dalam literatur (UNESCO, 2021; OECD, 2021; Kemendikbud, 2020).

Beberapa penelitian telah mencoba mengidentifikasi akar permasalahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Rahman et al. (2022) mengungkapkan bahwa daerah terpencil menghadapi hambatan besar dalam akses pendidikan karena kurangnya infrastruktur. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor geografis menjadi kendala utama yang membutuhkan pendekatan kebijakan desentralisasi. Sementara itu, studi dari Setiawan dan Andini (2023) menyoroti rendahnya kualitas pengajaran akibat kurangnya pelatihan guru yang memadai. Hal ini diperparah oleh keterbatasan teknologi di sekolah, sebagaimana ditemukan oleh penelitian Kurniawan et al. (2021), yang menyatakan bahwa kurangnya akses ke teknologi digital menghambat pembelajaran modern.

Selain tantangan, kebijakan pendidikan di Indonesia juga menghadirkan peluang. Misalnya,

program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi kritik terkait kesiapan infrastruktur dan kompetensi pendidik (Rahman et al., 2022). Studi lain oleh Prasetyo dan Nugroho (2020) mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan berbasis teknologi dapat menjadi solusi jika didukung oleh pelatihan guru yang komprehensif dan penguatan infrastruktur.

Keunikan artikel ini (novelty) terletak pada analisis integratif dari isu-isu kebijakan pendidikan dengan pendekatan yang lebih holistik. Tidak hanya mengidentifikasi tantangan, artikel ini juga mengusulkan solusi berbasis bukti untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan penekanan pada kebijakan yang inklusif, berbasis teknologi, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Artikel ini juga memperbarui diskusi dengan menambahkan data dan perspektif terbaru dari literatur yang diterbitkan antara 2020-2024, memberikan landasan yang lebih kuat untuk pengambilan kebijakan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konsep "keadilan sosial dalam pendidikan" yang dipaparkan oleh Fraser (2008) dan diperkuat oleh temuan Rahman et al. (2022), Setiawan dan Andini (2023), serta Kurniawan et al. (2021). Selain itu, pendekatan teknologi pendidikan didasarkan pada framework TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) sebagaimana dijelaskan oleh Mishra dan Koehler (2006) yang relevan dengan konteks Indonesia (Prasetyo & Nugroho, 2020; OECD, 2021; Kemendikbud, 2020).

Dengan mengintegrasikan temuan ini, artikel ini berkontribusi pada diskusi akademik tentang kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam merancang kebijakan yang mampu menjawab tantangan abad ke-21 secara efektif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis literatur yang relevan dengan isu kebijakan pendidikan di Indonesia. Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data, termasuk Google Scholar,

Scopus, dan PubMed, untuk mendapatkan sumber akademik dan laporan kebijakan yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2010 hingga 2024. Fokus utama adalah literatur yang membahas tantangan, peluang, serta evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia.

Proses penelitian dimulai dengan mengumpulkan data yang relevan berdasarkan kata kunci seperti "kebijakan pendidikan Indonesia," "disparitas akses pendidikan," "kualitas pengajaran," dan "teknologi pendidikan." Setelah itu, literatur yang terkumpul disaring menggunakan kriteria seleksi tertentu, yaitu hanya mencakup studi yang berbasis data empiris, relevan dengan konteks Indonesia, dan diterbitkan dalam jurnal bereputasi. Dari proses ini, dipilih sebanyak 45 artikel dan laporan kebijakan untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis literatur dilakukan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan isu utama yang muncul dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Setiap tema dianalisis dengan mengacu pada teori-teori pendidikan yang relevan, seperti teori keadilan sosial (Fraser, 2008) dan framework TPACK (Mishra

& Koehler, 2006). Selain itu, triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai literatur yang berbeda.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian, penulis juga mempertimbangkan berbagai perspektif dari organisasi internasional, seperti UNESCO, OECD, dan UNICEF, yang memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai negara. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang tantangan kebijakan pendidikan di Indonesia, tetapi juga mengusulkan solusi berbasis bukti untuk mengatasi permasalahan tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia menghadapi empat tantangan utama, yaitu disparitas akses pendidikan, rendahnya kualitas pengajaran, relevansi kurikulum, dan integrasi teknologi. Tantangan ini dibahas secara rinci dengan

dukungan data empiris dan penelitian terdahulu.

Disparitas Akses Pendidikan

Tantangan pertama adalah disparitas akses pendidikan yang sangat mencolok, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian Rahman et al. (2022) menunjukkan bahwa daerah terpencil di Indonesia memiliki keterbatasan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan internet, yang menyebabkan akses ke sekolah menjadi sulit. Hal ini didukung oleh temuan Kurniawan et al. (2021), yang menunjukkan bahwa 60% sekolah di daerah terpencil tidak memiliki akses internet stabil. Penelitian ini konsisten dengan laporan UNESCO (2021), yang menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur pendidikan untuk mengurangi kesenjangan akses.

Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan kebijakan desentralisasi dapat menjadi solusi yang efektif. Misalnya, program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dapat ditingkatkan dengan alokasi dana yang lebih besar untuk daerah tertinggal. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta untuk

membangun infrastruktur di daerah terpencil juga perlu dipertimbangkan.

Kualitas Pengajaran

Masalah kedua adalah rendahnya kualitas pengajaran. Penelitian Setiawan dan Andini (2023) menunjukkan bahwa hanya 45% guru di Indonesia yang memiliki sertifikasi profesional, sementara sisanya belum mendapatkan pelatihan yang memadai. Temuan ini diperkuat oleh studi Prasetyo dan Nugroho (2020), yang menyoroti bahwa pelatihan guru berbasis teknologi dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Selain itu, penelitian oleh UNICEF (2020) menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pengajaran berdampak langsung pada rendahnya hasil belajar siswa, terutama di daerah miskin.

Solusi yang diusulkan mencakup penyelenggaraan pelatihan guru secara berkala dengan pendekatan blended learning, yang menggabungkan metode daring dan tatap muka. Program seperti ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Filipina, yang menunjukkan peningkatan

kompetensi guru hingga 30% dalam satu tahun (OECD, 2021).

Relevansi Kurikulum

Kurikulum pendidikan di Indonesia juga dianggap tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Penelitian oleh OECD (2021) menunjukkan bahwa hanya 35% siswa di Indonesia yang memiliki keterampilan literasi digital, padahal keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam era industri 4.0. Selain itu, studi Kurniawan et al. (2021) menyoroti kurangnya pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi.

Untuk meningkatkan relevansi kurikulum, pemerintah perlu merevisi kurikulum nasional dengan fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti literasi digital, komunikasi, dan pemecahan masalah. Selain itu, integrasi pembelajaran berbasis proyek juga dapat membantu siswa untuk lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Integrasi Teknologi dalam Pendidikan

Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi teknologi dalam pendidikan. Namun, penelitian oleh UNICEF (2020) menunjukkan bahwa hanya 40% sekolah di Indonesia yang siap menggunakan teknologi untuk pembelajaran daring. Selain itu, studi Prasetyo dan Nugroho (2020) menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan teknologi bagi guru menjadi hambatan utama dalam implementasi pembelajaran berbasis teknologi.

Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur digital dan memberikan pelatihan teknologi kepada guru. Selain itu, pengembangan platform pembelajaran lokal yang ramah pengguna dapat membantu meningkatkan adopsi teknologi di sekolah-sekolah.

Kebaruan Penelitian

Artikel ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan temuan terbaru dari literatur 2020-2024, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, artikel ini menawarkan pendekatan holistik yang mencakup analisis tantangan dan solusi kebijakan pendidikan, dengan fokus pada teknologi dan pemerataan akses.

Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung hanya berfokus pada salah satu aspek kebijakan pendidikan.

Dengan memperhatikan keempat tantangan utama ini, diharapkan kebijakan pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di era modern.

E. Kesimpulan

Isu kebijakan pendidikan di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari akses hingga kualitas dan relevansi. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini melalui kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berbasis teknologi. Investasi pada pelatihan guru, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan revisi kurikulum yang relevan menjadi prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A., Nugraha, T., & Rahmi, F. (2023). *Artificial intelligence in education: Supporting personalized learning in Indonesia*. *International Journal of Educational Technology*, 9(3), 67-89.
- Daryanto, P., & Prihatin, E. (2022). *Collaborative teaching approaches*

- in improving learning outcomes: A study in Indonesia.* Journal of Pedagogical Research, 12(4), 98-115.
- Kemendikbud. (2020). *Laporan Tahunan Pendidikan Indonesia.* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- OECD. (2021). *Education Policy Outlook: Indonesia.* Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Prasetyo, W., & Nugroho, S. (2020). *Digital transformation in education: Challenges and strategies in Indonesia.* Journal of Education and Development, 34(2), 45-56.
- Rahman, A., Setiawan, T., & Andini, P. (2022). *Educational disparities in remote areas: Policy analysis in Indonesia.* Indonesian Journal of Policy Studies, 19(1), 23-40.
- Rosdiana, S., Widodo, H., & Firmansyah, D. (2023). *Equity in education: Addressing learning outcome gaps in Indonesia.* Asian Journal of Educational Studies, 16(2), 34-52.
- Saputro, R., Harmono, T., & Cahyani, M. (2023). *Project-based learning as a tool to enhance critical thinking in Indonesian secondary schools.* Journal of Educational Innovation, 11(3), 78-92.
- Setiawan, T., & Andini, P. (2023). *Teacher training and its impact on educational quality in Indonesia.* Journal of Educational Research, 45(3), 67-80.
- UNESCO. (2021). *Global Education Monitoring Report.* United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNICEF. (2020). *Education and COVID-19: Response and Recovery in Indonesia.* United Nations Children's Fund.
- World Bank. (2019). *Indonesia Economic Quarterly: Education for a Competitive Economy.* The World Bank.